BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Suatu daerah dapat maju dan berkembang apabila mampu menciptakan roda pemerintahan yang transparan, akuntabilitasnya tinggi, dan penerapan *value for money* yang benar. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi keuntungan, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan tugasnya dengan baik secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dan

Desentralisasi Fiskal, maka terjadi perkembangan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang terjadi antara lain dari Sistem Sentralisasi menjadi Desentralisasi, dari Sistem Anggaran Tradisional menjadi Sistem Anggaran Berbasis Kinerja, dari Sistem Akuntabilitas Vertikal menjadi Sistem Akuntabilitas Horizontal, dari Sistem Akuntansi *Single Entry* dan *Cash Basis* menjadi Sistem Akuntansi *Double Entry* dan *Accrual Basis*. Otonomi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi suatu tuntutan bagi penyelenggara pemerintah daerah. Dengan transparansi pengelolaan keuangan tersebut masyarakat dapat memperoleh informasi secara faktual, sehingga dapat mengetahui permasalahan keuangan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang disertai tugas menjalankan roda pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah

pemerintah daerah berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak. Kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan dengan transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah khususnya pada pemerintah daerah adalah laporan keuangan daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimaafkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja sektor keuangan pada sektor publik memiliki peran yang penting sebagai upaya untuk memberikan dukungan untuk pihak-pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi kondisi keuangan pada suatu pemerintah daerah. Pada sisi lain pentingnya pengukuran atas kinerja keuangan akan memberikan dukungan sebagai upaya pemeriksaan agar keuangan daerah yang merupakan instansi publik dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghindari terjadinya penyelewengan yang dapat dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pengukuran kinerja untuk kepentingan

publik dapat dijadikan evaluasi dan tolok ukur untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Melalui pengukuran atas kinerja keuangan maka akan diperoleh gambaran yang jelas atas kondisi kinerja yang telah dicapai.

Pemerintah Daerah dituntut untuk melaporkan segala aktivitasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otonomi daerah menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Penulis memilih penelitian di salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Blitar. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar, maka judul penelitian yang dilakukan yaitu : **“Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar”**.

B. Permasalahan

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersil, sedang pada lembaga publik khususnya Pemerintah Daerah masih sangat terbatas. Hal ini karena :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga Pemerintah Daerah. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-

masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Karena disusun dengan pendekatan *incremental budget* maka sering kali mengabaikan bagaimana rasio dalam APBD. Misal adanya prinsip “yang penting pendapatan naik meskipun untuk menaikannya itu diperlukan biaya yang tidak efektif dan efisien”.

2. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian peranggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD-nya.

Berdasarkan hal ini, penulis ingin menganalisis rasio keuangan pada laporan keuangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Blitar, hasil analisis rasio keuangan pada laporan keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: “Bagaimana menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar?”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana menganalisis tingkat kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola keuangan daerah dan menambah pengetahuan dan wawasan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk menganalisis kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Blitar

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berguna sebagai tambahan pengetahuan serta sebagai bahan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.